

BAB III
FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN TIONGGOK-INDIA

Pada bab ini memaparkan tentang faktor utama ataupun isu lain yang menghambat proses penyelesaian sengketa perbatasan China-India. Terdapat empat variabel teori *Issue Linkage* yang digunakan yakni *Material Linkages*, *Bargaining Linkages*, *Organisational and Procedural Linkages* dan *Political Linkages*. Sub-bab pertama akan membahas tentang *material linkages* yang menjadi faktor utama dan mendasar penghambat proses negosiasi sehingga kasus ini belum terselesaikan. Terdapat dua aspek yang menjadi fokus pada variabel *material linkages* yakni pengaruh *state prestige* dan kurangnya implementasi *confidence building measures* (CBMs). *State prestige* menjadi kendala utama karena negara akan lebih berorientasi pada kepentingan nasional daripada resolusi sengketa perbatasan. Sedangkan CBMs yang telah dibentuk dalam beberapa perjanjian (1993, 1996, 2005) tidak berjalan optimal. Hal ini mengakibatkan langkah negosiasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai panduan. Selain itu ketidakefektifan CBMs berimbas pada biasanya definisi *Line of Actual Control* (LAC) yang seharusnya menjadi garis resmi perbatasan China-India. Definisi LAC yang masih bias mengakibatkan konflik senjata jarak dekat di sekitar kawasan perbatasan yang memperkeruh hubungan bilateral selama proses negosiasi.

Dalam analisis *issue linkage* penting untuk mengklasifikasikan setiap peran yang terlibat dengan membagi menjadi dua bagian yakni pihak *linker* dan pihak *linkee*.

Pihak Tiongkok berperan sebagai *linker* karena mempunyai kendali lebih atas perjanjian yang terjadi dalam *issue linkage*. *Linker* akan memberikan tawaran untuk memunculkan keterkaitan dengan isu lainnya diluar isu utama. Sementara pihak India sebagai *linkee* mempunyai peran sebagai penentu dalam hubungan dengan menerima tawaran tersebut atau tidak. Kedua aspek tersebut ditentukan dari kapasitas dan kekuatan yang lebih besar antara kedua belah pihak yang kemudian mempunyai kendali atas berjalannya proses negosiasi dalam konsep *issue linkage* ini (Haas, 1980, pp. 360-367).

Pada sub-bab kedua lebih mengarah kepada isu lain yang mempunyai pengaruh terhadap kasus ini dan menghambat proses negosiasi. Terdapat dua isu *political linkages* dan satu *organisational and procedural linkages* yang mempunyai pengaruh terhadap kasus sengketa perbatasan Tiongkok-India. Pertama, pengaruh Tibet sebagai negara bufferzone dalam sengketa kedua negara dan mempunyai hubungan sejarah, geografi bahkan religi. Posisi Tibet yang secara kedaulatan dibawah Tiongkok dan diakui oleh India menjadi pemicu awal aksi klaim Tiongkok terhadap wilayah India. Aksi klaim Tiongkok atas wilayah India (Aksai Chin & Arunachal Pradesh) berdasar pada keterkaitan budaya, bahasa dan agama dengan Tibet yang merupakan bagian dari kedaulatan Tiongkok.

Kedua, Pakistan juga mempunyai pengaruh kuat terhadap kasus sengketa perbatasan Tiongkok-India secara politik maupun keamanan. Tiongkok dan Pakistan melakukan perjanjian atas barter wilayah di Kashmir. Tiongkok diberikan sebagian wilayah Kashmir oleh India kemudian membantu konflik perbatasan dengan India.

Pakistan juga mempunyai peran atas berkembangnya penelitian dan uji coba nuklir di India. Pada tahun 1998 pertemuan tahunan Tiongkok-India dibatalkan akibat uji coba nuklir India-Pakistan di wilayah perbatasan (sektor barat). Uji coba nuklir ini kemudian merusak hubungan bilateral dan proses negosiasi yang sedang berlangsung. Tiongkok menganggap India telah melanggar lima prinsip Panchsheel tentang menjaga perdamaian dan ketenangan selama proses negosiasi. Selain itu juga menurunkan rasa percaya satu sama lain yang sedang dibangun dengan pendekatan “*Forward Looking*” *Confidence Building Measures* (CBMs).

Ketiga, keberadaan South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) akan menjadi institusi yang menghambat atau justru memberi dukungan untuk resolusi sengketa perbatasan.

3.1 Material Linkage

Material Linkage merupakan isu dasar dari suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kasus. Selain itu juga merupakan fakta asli yang dapat disimpulkan secara konkret dan tak terbantahkan (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse. , 2016, pp. 6-8). Dalam kasus ini lebih mengarah ke hal mendasar yang menghambat proses negosiasi dan kurang efektifnya perjanjian yang telah dibuat.

3.1.1 Kurangnya Implementasi *Confidence Building Measures* (CBMs)

Pendekatan CBMs merupakan cara alternatif yang dilakukan oleh Tiongkok dan India untuk menyelesaikan konflik perbatasan. CBMs mempunyai tiga target pembahasan utama yakni usaha meningkatkan komunikasi antar kedua negara,

mengurangi ketegangan selama proses negosiasi dan meminimalisir kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan (Chansoria, *India and China: A Case of Constrained Cooperation*, 2011, pp. 99-101).

Proses negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan sudah dimulai sejak tahun 1981 dan masih berlangsung hingga sekarang. Terbagi menjadi tiga fase yakni fase pertama tahun 1981-1987, fase kedua 1988-2003 dan fase ketiga 2003-sekarang. Fase kedua merupakan langkah signifikan selama proses negosiasi dengan pembentukan CBMs. Perjanjian tahun 1993 dan 1996 merupakan basis dari pendekatan CBMs dengan fokus pada hubungan militer kedua negara dan definisi dari *Line of Actual Control* (LAC) (Chuan, 1989, pp. 5-9).

Penelitian ini berfokus pada fase ketiga dengan periode 2005 (*Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement*) hingga 2017 (*Momentum of Dooklam Standoff*). Pada fase pertama dan kedua implementasi CBMs belum berjalan optimal dengan beberapa kegagalan yang terjadi. Sebagai contoh, setahun pasca perjanjian CBMs fundamental tahun 1993 justru terjadi konflik militer di kawasan perbatasan dan serangan udara. Hal ini diakibatkan belum ada definisi garis yang disetujui antar kedua negara sehingga penempatan pasukan militer terlalu dekat yang rawan konflik. Bahkan pada CBMs kedua tahun 1996 juga belum menyelesaikan masalah definisi garis perbatasan. Hal ini berakibat pada tumbuhnya gesekan antar pasukan militer yang berjaga di sekitar garis perbatasan (Malik J. M., 1995, pp. 317-320).

Ide awal pembentukan CBMs tahun 1993 untuk penyelarasan LAC dan pengurangan kekuatan militer di sekitar garis perbatasan. Hal ini menjadi lompatan besar bagi perkembangan hubungan diplomasi kedua negara setelah hiatus pasca perang 1962. Pada CBMs tahun 1996 melengkapi dengan memberikan definisi jelas terhadap jumlah kekuatan militer yang diperbolehkan beroperasi di sekitar kawasan perbatasan ataupun jenis senjata yang diperbolehkan. Namun secara menyeluruh kedua CBMs fundamental ini hanya berfokus pada upaya pengurangan ketidakpercayaan, kesalahpahaman dan perbedaan pendapat tentang kegiatan militer di kawasan perbatasan (Sidhu & Yuan, *Resolving the Sino-Indian Border Dispute: Building Confidence Through Cooperative*, 2001, p. 352).

Perjanjian tahun 2005 merupakan respon dari kurangnya optimalisasi CBMs tahun 1993 dan 1996. Pada perjanjian ini lebih fokus kepada aspek fundamental proses negosiasi sengketa perbatasan antar kedua negara. Namun CBMs ini belum terealisasi dengan optimal, terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal IV dan VII pada perjanjian ini menjadi penekanan oleh India karena dilanggar oleh Tiongkok:

ARTICLE IV

The two sides will give due consideration to each other's strategic and reasonable interests, and the principle of mutual and equal security.

ARTICLE VII

In reaching a boundary settlement, the two sides shall safeguard due interests of their settled populations in the border areas (India M. C., 2005).

Dai Bingguo sebagai mantan perwakilan khusus Tiongkok dalam JWG memberikan pernyataan yang bertentangan dengan pasal IV. Tiongkok menekan India

untuk menerima tawaran agar klaim yang dilakukan di wilayah Sektor Timur disetujui. Tiongkok mendeklarasikan bahwa Tawang (Sektor Timur) secara sah merupakan bagian dari teritorialnya berdasar pada budaya dan administratif. Selain itu Dai juga menyatakan bahwa Inggris mengakui dan menerima bahwa Tawang bagian dari teritorial Tiongkok. Hal ini bertolak belakang dengan McMahon Line yang dibentuk oleh Inggris dan Tawang berada 37 kilometer di wilayah teritorial India (Chansoria, 2011, p. 10).

Tiongkok juga melanggar pasal VII dengan meningkatkan kekuatan militer di sepanjang garis perbatasan di wilayah Tibet (*bufferzone* area). Membangun pos militer di garis perbatasan hingga pos dagang di kawasan perbatasan yang ditinggali penduduk. Selain itu Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi pada Juni 2007 menyatakan bahwa keberadaan penduduk di Arunachal Pradesh tidak akan berpengaruh pada klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Sikap acuh Tiongkok ini sama seperti di kasus sengketa Laut China Selatan yang menolak putusan pengadilan Arbitrase bahkan tetap membangun pulau buatan di wilayah sengketa. Hal ini membuktikan bahwa CBMs yang dibentuk belum optimal dan menjadi penghambat proses negosiasi sengketa perbatasan (Chansoria, 2011, p. 11).

Special Representative Meeting (SRM) yang dibentuk untuk melanjutkan misi *Joint Working Group* (JWG) tidak menemukan hasil yang signifikan. JWG dan SRM merupakan usaha implementasi CBMs yang dibangun oleh kedua belah pihak. Selama 19 kali pertemuan SRM tidak ada pembahasan spesifik tentang *Line of Actual Control* (LAC) yang seharusnya menjadi pembahasan utama. Pembahasan dalam SRM lebih

mengarah kepada usaha kerjasama bidang politik, ekonomi, keamanan dan budaya namun mengesampingkan pembahasan LAC. Pada pertemuan ke 15 menjadi titik balik SRM setelah kedua belah pihak melakukan penandatanganan *Agreement on the Establishment of a Working Mechanism on Consultation and Coordination on India-China Border Affairs*. Pertemuan ke 16 ini menjadi satu-satunya forum yang membahas tentang masalah sengketa perbatasan (Chansoria, 2012, p. 18).

Working Mechanism on Consultation and Coordination (WMCC) on India-China Border dibentuk untuk membahas lebih dalam tentang masalah sengketa perbatasan yang selama ini dikesampingkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan beberapa pasal didalam perjanjian. Contoh pada pasal V disebutkan bahwa “*will not discuss resolution of the Boundary Question or affect the Special Representatives Mechanism*”. WMCC menurut Tiongkok ataupun India lebih kearah forum yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi masalah perbatasan (Chansoria, 2012, pp. 27-29).

Berbagai forum yang telah dibentuk untuk optimalisasi CBMs tidak berjalan efektif. Terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok setahun pasca perjanjian WMCC 2012. Pada 15 April 2013, *People's Liberation Army (PLA)* Tiongkok masuk ke wilayah Ladakh (area sengketa) sejauh 19 km dan mendirikan tenda pos keamanan. Hal ini memaksa India untuk merespon pelanggaran tersebut dengan menurunkan angkatan bersenjata dan membangun pos dengan kamera pengintai. Kasus ini berlanjut dan terjadi serangan besar oleh Tiongkok terhadap India pada September 2014. Serangan tersebut sebagai respon terhadap pembangunan pos

dengan kamera pengintai dan penggalian kanal yang dilakukan oleh India. Ironisnya segala serangan yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut dilakukan setelah berbagai forum CBMs seperti JWG, SRM, WMCC, perjanjian tahun 1993, 1996, 2005 dan 2012 (Chansoria, 2016, pp. 12-14).

Pada 3 Oktober 2013 kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk tidak menggunakan kemampuan militer dengan penandatanganan *Border Defence Cooperation Agreement* (BDCA). Namun BDCA masih menimbulkan celah yang dimanfaatkan Tiongkok untuk memperkuat kedudukannya dalam proses negosiasi sengketa perbatasan. Seperti pada pasal II, tertulis bahwa kedua negara harus berbagi informasi tentang latihan militer, pesawat, operasi pembongkaran dan ranjau tetapi tidak secara spesifik menyebut jumlah atau jenisnya. Tiongkok diragukan akan memberikan informasi secara transparan mengenai kegiatan penerbangan militer ataupun pesawat kargo yang mendarat di kawasan perbatasan. Sementara pasal III menguraikan bahwa pertemuan berkala akan diwakili oleh perwira/ komando militer. Gagasan ini sudah direkomendasikan dalam beberapa forum mulai dari JWG, SRM hingga WMCC namun belum tidak memberi hasil signifikan. Pasal VI tertulis bahwa kedua belah pihak tidak akan mengikuti atau mengawasi disisi lain daerah sekitar LAC. Namun hingga saat ini definisi LAC belum ada persetujuan bersama sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap pasal ini. Pada prakteknya tidak ada perubahan signifikan yang terjadi di lapangan. Tertulis didalam kesepakatan untuk menarik mundur seluruh pasukan militer dari LAC. Namun Tiongkok justru memanfaatkan situasi tersebut untuk tawar menawar dengan India. Tiongkok bersedia

menarik mundur seluruh pasukan apabila India bersedia meruntuhkan banteng pertahanan di Chumer, Ladakh dan menarik mundur seluruh petugas patroli di kawasan LAC. India merasa terdesak dengan tawaran ini karena banteng dan patroli untuk mencegah PLA yang beberapa kali menyusup ke wilayah sengketa (Arunachal Pradesh dan Ladakh). Krisis kepercayaan justru semakin meningkat seiring dengan berbagai perjanjian CBMs yang disepakati (Chansoria, 2014).

Tiongkok merupakan pihak yang lebih dominan dalam setiap pelanggaran atas perjanjian yang telah disepakati. Tiongkok mempunyai kapasitas militer yang mendukung kepentingan politiknya dan kapabilitas untuk menaikkan tensi di Himalaya. Hal ini menjadi langkah pasif Tiongkok untuk meningkatkan kedudukan diplomatik dalam proses negosiasi. Insiden pelanggaran yang terjadi secara sporadis di garis perbatasan merupakan akibat dari belum adanya definisi LAC yang disetujui. Tiongkok memanfaatkan situasi ini untuk terus menegaskan klaimnya khususnya di sektor timur Arunachal Pradesh dan sektor barat Ladakh.

3.1.2 Pengaruh Prestise Negara (State Prestige)

Sengketa perbatasan Tiongkok-India merupakan kasus abadi yang bertahan lama dan sulit untuk diselesaikan serta menyebabkan pertempuran militer dan kebuntuan diplomatik. Hal ini diperburuk dengan timbulnya perang tahun 1962 yang menjadikan proses negosiasi sengketa perbatasan semakin sulit. Pasca peperangan, hubungan bilateral semakin merenggang dan krisis kepercayaan yang semakin meningkat. Hal ini begitu kontras dengan perkembangan peran Tiongkok maupun India dalam urusan internasional yang signifikan dan sistematis (Fang, 2002, pp. 150-153).

Bahkan Tiongkok secara dominan mencoba memberikan citra bagus terhadap dunia internasional untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Vietnam, Rusia dan Mongolia. Sementara India secara aktif menyelesaikan sengketa perbatasannya dengan Pakistan khususnya di daerah Rann of Kutch walaupun belum sepenuhnya (Wiegand, 2011, pp. 21-25).

a. Konsep State Prestige

State Prestige merupakan pengakuan publik dan penghormatan terhadap pentingnya sebuah negara dalam lingkup dan sistem internasional yang tergambar dalam pencapaian, kapasitas dan karakter. Oleh karena itu *state prestige* terkait dengan kedudukan, kehebatan, dan status yang mempunyai hubungan kuat dengan kehormatan, reputasi dan kebanggaan suatu negara. *State prestige* disebut juga sebagai *invisible hand* yang memotivasi aktor untuk terus mempertahankan citra dan kepentingan negaranya. Saat ini *state prestige* menjelma dalam proses diplomatik sebagai alat untuk mendirikan hirarki informal antar negara dan mengidentifikasi kelompok yang sebaya atau yang seimbang (kekuatan militer/ ekonomi) (Renshon, 2015, pp. 659-695). Negara mempunyai naluri untuk meningkatkan atau mempertahankan kedudukan mereka untuk mencari simbol atau status agar harga diri mereka dihargai dengan cara tertentu seperti peningkatan alutsista, penyelenggaraan acara internasional, membentuk kebijakan luar negeri yang proaktif seperti proyek bantuan asing. *State prestige* akhirnya digunakan aktor negara sebagai instrumen untuk menjaga kehormatan kepentingan negaranya (Paul & Shankar, 2014, pp. 165-171).

Terdapat tiga hal dasar yang memotivasi negara untuk mempertahankan klaim atas wilayah sengketa yakni nilai/ symbol wilayah sengketa bagi negara, dorongan politik domestik dan lingkungan geopolitik. Sementara *State Prestige* menjadi pendorong dari tiga hal dasar sebelumnya yang menjadikan proses negosiasi semakin buntu. *State Prestige* menjadi alat para elit pemimpin negara untuk tidak mengubah *status quo* atas klaim di perbatasan Tiongkok-India. Nilai/ symbol negara mempunyai peran penting untuk mengidentifikasi klaim negara dalam sengketa perbatasan. Setidaknya terdapat dua jenis nilai yang mendorong klaim negara dalam sengketa perbatasan yakni hubungan adat, etnis atau agama yang ditandai dengan *landmark* dan hubungan sejarah pendahulunya (Goertz, Gary, & Diehl, 1992, p. 11).

b. Tiongkok

Sementara Tiongkok lebih berorientasi pengamanan konsesi dalam sengketa perbatasan dengan terus mempertahankan klaim sektor timur. PM Zhou Enlai menyatakan bahwa keputusan McMahon Line sebagai garis perbatasan yang diakui oleh India merupakan penodaan terhadap martabat negara. Hal ini dikarenakan McMahon Line merupakan warisan imperialisme Inggris dan tidak ada campur tangan antar kedua negara yang bersengketa (Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*, 2001, pp. 70-73). Selain itu Tiongkok menganggap India sebagai kasta bawah dalam sistem internasional sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk bernegosiasi dengan Tiongkok. Menurut sudut pandang Tiongkok, perang tahun 1962 merupakan peringatan bagi India karena telah bersifat keras dan provokatif. Selain itu Tiongkok secara sepihak membatalkan JWG pada tahun 1998-1999 karena

aktifitas tes nuklir yang dilakukan oleh India bersama Pakistan (Deng, 2008, pp. 237-239).

Menurut data statistik Global Fire Power, secara numerik mempunyai kemampuan alutsista yang cukup mumpuni. Total pasukan militer Tiongkok mencapai 2.693.000 dengan personel aktif 2.183.000. Selain itu Tiongkok juga mempunyai 3.035 pesawat tempur, 7.716 tank dan 714 armada kapal tempur.

Pada Juli 2017, kedua negara melakukan *military show off* di sektor timur tepatnya Arunachal Pradesh dan Tawang. Hal ini dipicu dari aktifitas India yang melakukan patroli dengan menggunakan pesawat jet di atas kawasan perbatasan. Patroli ini dilakukan oleh India sebagai respon PLA yang masuk ke wilayah sengketa perbatasan dengan menggunakan kendaraan tempur. Namun kemudian Tiongkok merespon aktifitas tersebut dengan meluncurkan dua pesawat jet tipe Sukhoi-27 yang maju kearah pesawat India. Selain itu Tiongkok juga meluncurkan dua pesawat tanpa senjata untuk melakukan pengamanan dan netralisir kawasan Arunachal Pradesh dan Tawang. Hal ini menunjukkan betapa ambisius Tiongkok menanggapi masalah perbatasan dengan segala kekuatan militernya (Vombathkere, 2014). Pada tahun yang sama, Tiongkok kembali menunjukkan kelasnya dalam bidang militer di mata internasional. Angkatan laut Tiongkok melakukan latihan militer secara masif dengan Angkatan Laut Rusia di Laut Baltik. Hampir seluruh armada kapal tempur dikerahkan dengan tujuan menunjukkan kapabilitas militernya. Hal ini dipertegas dengan parade militer Tiongkok untuk merayakan ulang tahun ke 90 PLA. Perayaan ini melibatkan lebih dari 12.000 pasukan siap tempur, 600 peralatan militer dan 100 pesawat canggih.

Rentetan acara ini dilakukan bersamaan dengan momentum *Docklam Standoff* antara Tiongkok-India di Doka La (Tikhonova, 2017).

Docklam sebagai kawasan yang disengketakan menjadi salah satu target pembangunan infrastruktur Tiongkok. Hal ini dipicu peristiwa *Docklam Standoff* yang memicu kedua negara untuk segera mengamankan wilayah yang diklaim. Tiongkok bergerak lebih cepat dengan meneruskan pembangunan jalan raya di kawasan dataran tinggi Docklam sebagai penanda kawasan strategis. Selain itu jalan raya juga digunakan sebagai akses PLA untuk menduduki kawasan strategis *Chicken Neck* atau leher ayam di kawasan koridor Siliguri. Pembangunan juga terjadi di kawasan Tibet dengan memperpanjang jalur kereta api dari Lhasa-Xigase-Yadong-Nathu La. Nathu La merupakan salah satu pos dagang lintas batas antara Tiongkok dan India. Tiongkok juga membangun jalan tol dari Tibet hingga ke Pakistan melewati jalur Karakorum (Bhonsale, 2018, pp. 24-25). Disisi perbatasan Tiongkok dibangun landasan terbang Shigatse sebagai pusat kendali pesawat tanpa awak dan rudal serta Lhasa Gonggar sebagai pusat pangkalan pesawat tempur. Pangkalan Tiongkok di kawasan perbatasan tidak sebanyak India namun mempunyai daya tempur dan fasilitas yang lebih lengkap (Marcus, 2018).

c. India

Pada tahun 1959 PM Jawaharlal Nehru mengartikulasikan *state prestige* ini sebagai penghambat resolusi sengketa perbatasan. Dalam pernyataannya di Lok Shaba (majelis rendah dalam Parlemen India) bahwa tampak tidak wajar apabila dua negara besar dengan kekuatan penuh memperebutkan satu wilayah kecil dimana sebagian

besar wilayahnya di pegunungan tinggi Tibet yang tidak ditinggali oleh penduduk. Ini bukan tentang bagian kecil dari wilayah namun juga *state prestige* atau martabat nasional yang terlibat (Maxwell, *India's China War*, 2013, pp. 79-81). India sejak dini telah menggunakan *state prestige* sebagai salah satu unsur untuk menghadapi sengketa perbatasan Tiongkok-India.

Kekalahan pada perang 1962 menjadikan India harus menjunjung martabat negaranya kembali di mata internasional. Pada tahun 1981, untuk pertama kalinya proses diplomatik dibentuk kembali oleh kedua negara dan India menolak atas perubahan *status quo* yang diusulkan oleh Tiongkok. Sektor timur (Arunachal Pradesh & Tawang) yang sudah dikuasai oleh Tiongkok merupakan salah satu faktor pendorong India untuk menolak resolusi *status quo*. Penolakan atas resolusi yang digagas oleh Tiongkok karena India tidak ingin mendukung legitimasi atas klaim Tiongkok dan semakin memperburuk martabat negara di mata internasional (Kalha R. S., 2014, pp. 57-58).

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian terbesar India yakni berada di sektor timur sengketa perbatasan. Tawang menjadi wilayah sengketa yang mempunyai hubungan religi dengan India dimana merupakan salah satu tempat ibadah terbesar bagi kaum Budha. Namun Tiongkok menepis klaim tersebut dengan bukti warisan sejarah Dinasti Qing yang menyatakan Tawang merupakan bagian dari teritorialnya (Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century*, 2001, pp. 56-58)

India saat ini menduduki peringkat keempat di dunia dalam jumlah dan kapasitas militernya. (Dutta, 2017) Berdasar data statistik Global Fire Power, secara

numerik India mempunyai kapasitas yang lumayan banyak dengan 4.207.250 dengan tenaga aktif 1.362.500. Selain itu juga mempunyai alat alutsista yang mumpuni dengan 2.185 pesawat tempur berbagai jenis, 4.426 tank dan 295 armada kapal tempur (Global Fire Power, 2018).

Ancaman berbahaya akan terjadi bila kedua negara saling beradu kekuatan senjata nuklir. Tiongkok maupun India memiliki pusat penelitian pengembangan energi nuklir yang dibarengi dengan pembuatan senjata nuklir. Pada tahun 1998 menjadi pemicu reaksi Tiongkok mengenai senjata nuklir. India melakukan uji coba nuklir di sekitar kawasan perbatasan Arunachal Pradesh yang dianggap telah melanggar perjanjian damai yang berimbas pada dibatalkannya JWG ke 13. Kemudian Tiongkok merespon hal tersebut dengan membangun pusat penelitian energi nuklir di kawasan PoK. Selain pusat penelitian, Tiongkok juga membangun empat hulu ledak nuklir di kawasan tersebut. Tiongkok sejauh ini tetap mempertahankan martabat negaranya di atas India dengan terus menandingi kapasitas militernya (Sidhu & Yuan, 2001, p. 356).

Sementara India juga terus mengejar pembangunan jalan tol 608 km di sepanjang garis perbatasan. Selain itu India juga aktif mengaktifkan kembali dan membangun pangkalan udara di Ladakh yang berjarak 20 km dari Tiongkok. Jalur kereta api juga menjadi prioritas yang dibangun 1.000 km di sepanjang garis perbatasan melewati Missamari hingga Tawang. Jalur tersebut meliputi 378 km di Assam, ParashramKund-Rupai, 256 km di Assam-Arunachal Pradesh dan Bilaspur-Mandi-Manali-Leh serta 498 km di Himachal Pradesh-Jammu dan Kashmir (Bhonsale, 2018,

pp. 24-25). Pembangunan landasan terbang strategis dibangun oleh kedua negara di sekitar dataran tinggi Docklam. Disisi perbatasan India membangun landasan terbang Siliguri Bagdodra untuk helikopter tempur dan Hasimara untuk landasan terbang pesawat tempur (Marcus, 2018).

Sementara itu kompetisi pembangunan di kawasan perbatasan merupakan langkah yang ditempuh kedua negara untuk tetap menjaga prestisnya. Pembangunan di kawasan perbatasan dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian yang telah dilakukan yakni menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan selama proses negosiasi berlangsung. Pembangunan di kawasan perbatasan dilakukan dengan niat untuk memberikan kemudahan akses bagi para tentaranya untuk mencapai target atau distribusi senjata. Selain itu, Tiongkok maupun India akan terus melakukan perlawanan atau *infrastructure race* sebagai langkah menyelamatkan martabat bangsa (TNN, 2011).

3.2 Political Linkage

Sebuah struktur dalam sistem internasional yang menghubungkan antara satu negara dengan negara yang lainnya atau satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse. , 2016, pp. 12-15). Dalam kasus ini lebih mengarah kepada kombinasi isu-isu sosial dan politik yang berhubungan dengan isu dasar yakni sengketa perbatasan.

3.2.1 Pengaruh Tibet dalam Sengketa Perbatasan Tiongkok dan India

Sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India telah berlangsung selama lebih dari enam dekade. Berbagai proses negosiasi telah dilakukan namun belum menemukan hasil yang signifikan hingga kini. Penyebab lambatnya proses negosiasi tidak hanya muncul dari internal (perjanjian) namun juga faktor eksternal termasuk keterlibatan Tibet. Tibet menjadi hal yang selalu disebutkan dalam proses negosiasi walaupun hanya sebagai alat dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Selain itu, posisi Tibet hanya digunakan oleh kedua belah pihak untuk memperluas hubungan bilateral dan bukan untuk tujuan resolusi konflik. Pengaruh Tibet dalam kasus ini tidak hanya sebatas Dalai Lama ataupun pengungsi Tibet di India namun juga keterlibatan konflik Tiongkok-Tibet didalamnya.

Hubungan Tiongkok-Tibet mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan proses negosiasi sengketa perbatasan Tiongkok-India. Sebagai bukti proses negosiasi Tiongkok-India runtuh pada tahun 1986 berbarengan dengan runtuhnya hubungan bilateral Tiongkok-Tibet yang sudah dibangun sejak 1979. Semenjak kejadian itu, India memberikan akses kepada Dalai Lama untuk melakukan aktifitas politik internasional khususnya kunjungan perdananya ke Washington DC. Hal ini bertujuan untuk internasionalisasi masalah Tibet untuk meminta bantuan internasional (Goldstein, 1989, pp. 251-254). Kunjungan Dalai Lama ke Washington DC merupakan kontribusinya atas aksi pro kemerdekaan di ibukota Lhasa. Resolusi yang dibentuk dengan penandatanganan perjanjian tahun 2005 tidak bertahan lama, pada tahun 2006 duta besar Tiongkok di New Delhi menyatakan klaimnya atas Arunachal Pradesh

beserta Tawang. Tawang menjadi bagian penting yang klaimnya diprotes keras oleh Tibet karena merupakan situs Biara Tibet terbesar dan tempat kelahiran Dalai Lama keenam (Ganguly, 2004, p. 115).

Secara menyeluruh terdapat tiga poin analisis yang menjadi pertimbangan dalam keterlibatan Tibet di kasus ini. Pertama, status Tibet sebagai wilayah independen atau bagian dari otonomi Tiongkok. Kedua, kebijakan India atas kegiatan pengungsi Tibet di wilayah teritorialnya seperti pembentukan pemerintahan Tibet sementara di pengasingan dan kepastian atas posisi dan status pemimpin agama Dalai Lama. Ketiga, ketakutan India atas keberadaan militer Tiongkok (PLA) di dataran tinggi Tibet dan sepanjang garis perbatasan (Chellaney, *Asian Juggernaut: The Rise of China, India and Japan*, 2006, pp. 151-153).

Pertama, secara *de facto* India telah mengakui Tibet sebagai bagian dari otonomi Tiongkok pada 29 April 1954 pasca penandatanganan *India-China Agreement on Trade and Intercourse between Tibet Region of China and India*. Pengakuan ini kembali ditegaskan pada 23 Desember 1988 dengan *Sino-Indian Joint Press Communique* dan pada 25 Juni 2003 dengan penandatanganan *Declaration on Principles for Relations and Comprehensive Cooperation* serta pada 11 April 2005 dalam *Joint Statement India-China*. Dalam surat yang dikirim pada 5 November 1962 ke pemimpin negara Asia Afrika menekankan bahwa seluruh nama sungai, jalan dan *landmark* lainnya di Arunachal Pradesh dan Aksai Chin berbahasa Tibet (Norbu, 2001, pp. 7-11). Hal ini menjadi modal Tiongkok untuk memperkuat posisinya dalam proses negosiasi sengketa perbatasan yang melibatkan wilayah Tibet.

Tibet menjadi titik pusat untuk segketa perbatasan khususnya bagi Tiongkok. Sejak India menerima Tibet sebagai bagian dari otonomi Tiongkok, ekspansi dilakukan dan menjadikannya kawasan strategis untuk mengontrol kawasan perbatasan. Bagian barat wilayah Tibet menjadi titik strategis untuk mengatur Aksai Chin (sektor barat) dan bagian timur Tibet menjadi titik untuk mengatur Arunachal Pradesh (sektor timur).

Kedua, India belum konsisten menerapkan kebijakan yang telah dibentuk terhadap keberlangsungan pengungsi Tibet di wilayah teritorialnya. Secara resmi India melarang kegiatan anti-China yang dilakukan oleh para pengungsi Tibet di wilayahnya namun masih memperbolehkan orang-orang Tibet untuk membentuk pemerintahan di pengasingan. India bahkan memberikan dukungan dan bantuan atas keberlangsungan Central Tibetan Administration dan memfasilitasi Dalai Lama untuk melakukan aktivitas politik internasionalnya (Mohan, 2003, pp. 257-259).

Para pengungsi Tibet masuk ke wilayah India mulai tahun 1950 pasca penjajahan yang dilakukan oleh Tiongkok. Pengungsi ini kemudian tinggal di Kalimpong, West Bengal untuk mendapatkan perlindungan dan membentuk pengasingan. Perpindahan penduduk secara masif ini diakibatkan kekerasan yang dilakukan oleh PLA terhadap para penduduk lokal Tibet. Penyerangan bersenjata dan peluncuran rudal yang dilakukan oleh PLA dipicu oleh aksi protes warga Tibet atas penjajahan yang dilakukan oleh Tiongkok. Aktivitas PLA dalam penyerangan dan pengejaran para gerilya Tibet tidak hanya dilakukan di wilayah Tibet namun hingga melewati perbatasan Tiongkok-India (Jain, 1981, pp. 167-168).

Tiongkok maupun India mempunyai kepentingan yang sama atas posisi Tibet. India akan terus mendukung kegiatan orang-orang Tibet di pengasingan sebagai salah satu kepentingan nasionalnya untuk menghidupkan kembali Tibet sebagai *bufferzone* antar kedua belah pihak. Sementara itu Tiongkok mengencam kegiatan dukungan dan bantuan yang dilakukan oleh India terhadap Tibet karena dianggap mengganggu urusan internal (Tibet bagian dari otonomi Tiongkok) dan merusak proses negosiasi antar kedua negara (Jain, 1981, pp. 98-99).

Posisi Tibet menjadi penting dan signifikan apabila para elit politik termasuk Dalai Lama dan penduduknya di pengasingan menuntut untuk merdeka. Skenario terburuk bagi Tiongkok adalah berkurangnya wilayah territorial dari 2,5 juta km² dan akan menyusut ribuan km. Beberapa wilayah seperti Tianshui, Gansu dan Sichuan, Chengdu (Tiongkok bagian tengah) yang sebelumnya merupakan wilayah belakang nantinya akan berjarak 100 km dari perbatasan dan menjadi garda pos terdepan. Selanjutnya Tibet beraliansi dengan India dan memberikan akses pasukan India untuk masuk ke Tiongkok tengah dengan bebas. Peperangan akan terjadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Tiongkok tanpa perantara Tibet dan menjadi ancaman berbahaya bagi Tiongkok. Resiko inilah yang akhirnya menjadi pertimbangan para elit Tiongkok untuk tidak memberikan kemerdekaan bagi Tibet atau membiarkan India mendukung kemerdekaan Tibet (Wang & Shakyia, 2009, pp. 25-28).

Ketiga, India mempunyai ketakutan yang sama atas Tiongkok sama seperti yang disebutkan di poin kedua. Tibet masih menjadi titik pusat antar kedua negara dalam sengketa perbatasan. Pasca perang tahun 1962, Tiongkok belum menarik

kembali pasukannya (PLA) dari kawasan Tibet khususnya di dataran tinggi dan sepanjang garis perbatasan. Pada tahun 1990 terhitung 500.000 pasukan PLA masuk ke seluruh area dataran tinggi Tibet, selain itu 150.000 pasukan di sektor timur dan 40.000 di sepanjang garis perbatasan lainnya. Ketakutan India lainnya yakni infrastruktur pertahanan yang dibangun Tiongkok berupa landasan udara dan jalan yang terbentang melewati Nepal, Pakistan, India hingga Xinjiang. Hal ini akan menjadi kekhawatiran berlebih oleh India jika melihat peperangan yang terjadi pada tahun 1962 (Norbu, 2001, pp. 18-20). Tibet akan memberikan pengaruh besar terhadap dua negara besar yang sedang beradu kepentingan untuk sengketa perbatasannya.

Tiongkok menjadi pihak yang lebih dominan menentukan arah negosiasi sengketa perbatasan dengan India. Jika dilihat dari sejarah, Jawaharlal Nehru menerima Tibet bagian dari Tiongkok dengan penandatanganan *India-China Agreement on Trade and Intercourse between Tibet Region of China and India* (1954) berharap seluruh urusan sengketa perbatasan sudah selesai namun ternyata tidak. Tiongkok justru merilis peta yang menggambarkan sebagian wilayah India (Arunachal Pradesh, Sikkim & Aksai Chin) masuk dalam teritorial Tiongkok. Jika dilihat dari sudut pandang Tiongkok, kemerdekaan Tibet akan menjadi resolusi awal penyelesaian konflik antara Tiongkok dan Tibet. Pemerintahan Tibet akan mudah dipengaruhi oleh Tiongkok untuk memperkuat legitimasi aksi klaimnya. Sementara dari sudut pandang India, Tibet akan berdiri di belakang India untuk mencapai resolusi dan bergerak melalui pengasingan dan kemerdekaan Tibet akan menjadi pendukung dengan gerakan sparatisnya. Namun, penyelesaian masalah Tibet menjadi kunci untuk memecahkan masalah perbatasan dan

untuk meredakan persaingan strategis. Secara tidak sadar, Tibet menjadi dasar yang membentuk hubungan politik antara Tiongkok & India sehingga penyelesaian masalah Tibet menjadi utama dalam upaya resolusi sengketa perbatasan (Norbu, 2001, pp. 41-42).

3.2.2 Pengaruh Pakistan dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-India

Perkembangan aliansi antara Tiongkok dan Pakistan mulai terlihat pasca perang antara Tiongkok dan India tahun 1962. Kedua negara menggambarkan hubungan mereka sebagai *one nation two countries* bahkan PM Tiongkok Wen Jiabao menekankannya sebagai *brother forever*. Pada tahun 2005, Tiongkok dan Pakistan semakin tegas dengan penandatanganan *Treaty of Friendship and Cooperation and Good Neighbourly Relations*. Dukungan Tiongkok terhadap Pakistan juga dilancarkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tiongkok menolak dan memprotes naskah resolusi Soviet bahkan Amerika yang dianggap gagal meredam serangan India ke Pakistan. Namun akhirnya Tiongkok mengusulkan naskah resolusi atas penyerangan yang dilakukan India ke Pakistan dan memaksa tentara India untuk mundur tanpa syarat. India mendapat bagian terberat dari hubungan Tiongkok-Pakistan ini selagi masalah perbatasan antara India-Pakistan ataupun India-Tiongkok juga belum selesai (Jetly, 1979, pp. 267-273).

Sejak tahun 1960 Tiongkok terus memberikan bantuan dana ataupun tenaga kerja kepada Pakistan untuk mengembangkan industri dan kompleks penerbangan di Islamabad. Hal yang paling berdampak bagi keamanan nasional India yakni kegiatan distribusi bantuan senjata dan teknologi nuklir ke Pakistan. Teknologi nuklir jenis M

11 (1991-1992) dan M-9 (1993) dengan area tembak hingga ke wilayah India. Namun India menganggap bahwa distribusi teknologi nuklir ini melanggar *Missile Technology Control Regime* (MTCR) (An, 2012). Selain teknologi nuklir, Tiongkok juga memberikan bantuan berupa jet tempur dan kapal perang induk dalam jangka waktu dari 2009 hingga 2013. Kerjasama pertahanan ini dipertegas dengan penandatanganan *Sino-Pakistan Border Agreement* tahun 2011 yang berbarengan dengan penandatanganan kerjasama bidang ekonomi, teknologi, keuangan dan sumber energi (An, 2011).

Kehadiran Tiongkok di *Pakistan Occupied Kashmir* (PoK) menjadi masalah lain yang menjadikan konflik Tiongkok-India semakin rumit khususnya sengketa perbatasan. Sejauh ini Tiongkok telah menguasai 20% dari tanah sengketa yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Secara detail Tiongkok telah menguasai 38.000 km² di Aksai Chin dan 5.180 km² di Kashmir (Malik M. , 2010). Pakistan telah menyerahkan sengketa perbatasan di wilayah Kashmir kepada Tiongkok untuk maju sebagai representatif dalam proses negosiasi dengan India.

Tiongkok juga mulai mempertegas kehadirannya di PoK dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Karakoram. Tujuan utama Tiongkok dalam pembangunan jalan ini untuk mempermudah akses distribusi minyak dari Gulf ke Gwadar di Balochistan. Sebagai keuntungan ekonomi bersama, Gwadar akan dibentuk sebagai kawasan industri bebas pajak serta jalur kereta yang melewati Jalur Sutra kuno. Namun pembangunan markas kapal perang di pelabuhan Gwadar menjadi ancaman bagi keamanan India (Malhotra, 2012, pp. 71-75). Pembangunan jalan tol Karakoram juga menjadi strategi Tiongkok untuk mengontrol para kelompok separatis Uighur yang

menginginkan kemerdekaan Turkmenistan Timur. Keamanan Pakistan dan Tiongkok lebih mudah menahan dan menangkap semua kelompok separatist Uighur yang melewati jalan Karakorum (Varma, 2010).

Posisi Tiongkok semakin meningkat dengan membangun *Hydro Power Project* bekerjasama dengan Pakistan. India mulai resah karena wilayah yang menjadi lokasi pembangunan bendungan di kawasan sengketa dan illegal. Namun Tiongkok secara tegas mengabaikan itu dan justru mengundang para pengusaha Tiongkok untuk membangun 12 bendungan lagi di sekitar kawasan tersebut. Selain itu sebagai dalih pengamanan pembangunan infrastruktur, lebih dari 11.000 tentara PLA masuk ke kawasan PoK. Para tentara PLA ini juga membuat 22 terowongan rahasia bahkan orang-orang Pakistan juga tidak mendapatkan akses kesana. Tiongkok berdalih bahwa terowongan tersebut digunakan sebagai jalur pipa gas menuju ke Xinjiang. Selain itu dibangun juga kompleks perumahan permanen yang digunakan untuk tempat tinggal para tentara PLA dan pekerja Tiongkok di kawasan PoK. Hal ini akan semakin mempersulit proses negosiasi sengketa perbatasan India Tiongkok karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok (Harrison, 2010).

Nuklir menjadi hal yang paling dikhawatirkan oleh India dari segala aktivitas Tiongkok yang dilakukan di PoK. Kerjasama Tiongkok-Pakistan tentang nuklir dimulai tahun 1991 (Chasma 1) yang kemudian diperbaharui tahun 2004 (Chasma 2). Pada tahun 2005 India-Amerika merealisasikan Kesepakatan 123 yang bergerak dibidang nuklir. Hal ini kemudian langsung ditanggapi oleh Tiongkok pada tahun 2008 dengan membantu Pakistan untuk membangun reaktor nuklir Chasma 3 dan Chasma

4. Hal ini menciptakan dinamika persaingan pertahanan semakin kuat dan berbahaya. Sehingga India mengusulkan dunia internasional untuk mengosiasikan *Fissile Cut-off Treaty* (FMCT) yang terverifikasi untuk menerapkan kontrol ekspor ketat dan tidak berbagi teknologi nuklir. Namun Tiongkok memberikan pembelaan bahwa bantuan ekonomi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami Pakistan sehingga dibutuhkan tindakan langsung seperti sumber daya energi (Yang, 2010).

Tiongkok dengan dukungan Amerika telah melanggar kesepakatan anggota *Nuclear Supplier Group* (NSG) untuk tidak memasok nuklir kepada non anggota NSG. Toleransi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk secara bebas menyediakan energi nuklir ke Pakistan. Hal ini membahayakan keamanan nasional India jika berlangsung secara terus menerus karena pusat pengembangan nuklir berada di kawasan PoK. Selain itu Tiongkok melanggar lima prinsip dasar Panchsheel untuk menjaga perdamaian dan stabilitas selama proses negosiasi sengketa perbatasan. Hal yang ditakutkan dari aktifitas transfer teknologi nuklir jika jatuh ditangan yang salah seperti rekam jejak yang terjadi di Libya, Korea Utara dan Iran. Oleh karena itu India menginginkan transparansi terhadap segala aktifitas nuklir yang terjadi di PoK. Hingga saat ini Pakistan mempunyai kapasitas untuk menciptakan hingga sepuluh hulu ledak setiap tahunnya. Menurut mantan Kepala Komite Intelejen India bahwa senjata nuklir Pakistan dipersiapkan untuk menghadapi serangan yang sewaktu-waktu dilancarkan oleh India (TNN, 2011).

Asia Selatan sebagai target terorisme selama dua dekade terakhir memperburuk situasi hubungan Tiongkok-Pakistan-India. Pakistan merupakan salah satu kawasan

pusat perkembangan jaringan terorisme, namun Tiongkok belum mengeluarkan respon positif dan aktif mengenai ini. Tiongkok bahkan tidak merespon terhadap serangan teroris yang terjadi di Mumbai pada tahun 2008. Namun India mendapat posisi untuk beraliansi dengan Amerika karena kerenggangan hubungan Amerika-Pakistan pasca pembunuhan Osama bin Laden. Aliansi India-Amerika ini untuk merespon masifnya kerjasama antara Tiongkok-Pakistan. Kerjasama India-Amerika lebih jelas, transparan dan tegas seperti penolakan India atas tawaran jet tempur. Hal ini merupakan usaha India untuk meredam kompetisi senjata di kawasan PoK. Namun Tiongkok belum juga mengembalikan sikap *coexistence and stability* sesuai dengan perjanjian Panchsheel (Li, 2010).

Tiongkok ingin mengimbangi kekuatan India di Asia Selatan dengan perantara Pakistan. Efek timbal balik juga dirasakan Pakistan dengan perlindungan Tiongkok khususnya di PoK. Pengaruh Tiongkok mulai terlihat dengan berpindahnya Pakistan dari sisi Amerika dan kini berjalan bersama dengan Tiongkok. Sementara relasi Tiongkok-Pakistan yang berbanding terbalik dengan Tiongkok-India menandai masih tingginya defisit kepercayaan antar kedua negara. Keamanan nasional India akan semakin terancam jika Tiongkok semakin memperluas pengaruhnya di Asia Selatan, tidak hanya di Pakistan. Sehingga saat ini Pakistan masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap keberlangsungan hubungan diplomatik Tiongkok-India (Orton, 2010, pp. 55-56).

3.3 Bargaining Linkage

Menghubungkan isu dengan isu lain sebagai opsi tawar menawar yang memberikan dampak positif ataupun negatif dalam perkembangan isu bagi kedua belah pihak (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary CONflict and Cooperation on the River Meuse. , 2016, pp. 7-8). Dal hal ini cenderung kepada interdependensi ekonomi atau perdagangan.

3.3.1 Pengaruh Ekonomi dan Perdagangan

Pada tahap awal kerjasama ekonomi Tiongkok-India yakni India-China Joint Economic Group on Economic Relations and Trade, Science and Technology. Pertumbuhan begitu seignifikan dari 264 juta USD pada 1990 hingga 2,9 miliar USD pada tahun 2000 (Dolla, 2011, pp. 64-66). Hubungan timbal balik perdagangan Tiongkok-India semakin berkembang dengan ekspor impor barang mentah. Masuknya Tiongkok di World Trade Center (WTO) 2011 juga memperluas jangkauan pasar ekspor termasuk India. Pada tahun 2006 dilakukan penandatanganan *Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement* dan menargetkan 40 miliar USD untuk perdagangan bilateral (Basu, 2001). Penurunan tren perdagangan pasca krisis tahun 2007-2008 sebesar 25% dengan cepat ditutup oleh kedua belah pihak. Sejak tahun 2009 pertumbuhan hubungan dagang kedua negara meningkat secara signifikan hingga puncaknya pada tahun 2015 mencapai 80 juta USD. Nilai ekspor Tiongkok ke India lebih dari 66,7 USD sementara nilai ekspor India ke Tiongkok berjumlah 6,5 miliar USD. Pada tahun 2011 Tiongkok melakukan MoU untuk membiayai pembangunan 16 GW tenaga batubara (Hannam, 2015).

Interdependensi ekonomi dan perdamaian digagas pada Perang Dunia Pertama oleh Woodrow Wilson dan semakin populer pasca Perang Dunia Kedua seiring dengan munculnya globalisasi (Kant, 1957, pp. 5-6). Hal yang paling dominan terlihat yakni investasi langsung yang masuk ke wilayah sengketa akan mempengaruhi kondisi perselisihan territorial. Investor akan memberikan cukup tekanan ke pemerintah untuk mempengaruhi langkah resolusi sengketa perbatasan seperti negosiasi atau militer. Perdagangan dan era globalisasi memaksa perang dibuat dengan biaya mahal untuk meminimalisir negara yang ingin terlibat. Sehingga untuk saat ini negara harus mempromosikan perdagangan tidak hanya untuk keuntungan ekonomi tapi juga untuk mempromosikan perdamaian (Copeland, 1996, pp. 3-4).

Namun Kenneth Waltz berpendapat bahwa ketergantungan ekonomi akan menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam perdagangan dan menciptakan persepsi menjatuhkan yang lemah demi kepentingan nasionalnya. Kekuatan besar akan lebih kebal terhadap fluktuasi perdagangan dalam hubungan bilateral. Sebagai contoh, pada tahun 2013 Tiongkok mengeksploitasi Jepang atas ketergantungan impor logam bumi langka untuk memaksa Jepang mengekstradisi nelayan kapal Tiongkok yang sengaja bertabrakan dengan penjaga pantai Jepang di kepulauan Senkaku (Bradsher, 2010). Melihat hal ini ketergantungan ekonomi bertindak sebagai kekuatan untuk menentukan opsi tindakan dengan negosiasi atau militer. Sementara suatu negara akan sangat sensitive ketika terjadi pemotongan perdagangan tiba-tiba yang akan berdampak pada kesejahteraan nasional (Caruso, 2003, pp. 49-51).

Skenario *win-win solution* jelas belum terwujud dalam keseimbangan perdagangan Tiongkok-India. Jika dilihat dari porsi total perdagangan Tiongkok pada tahun 2014 mencapai 4,3 triliun USD dan India hanya menyumbang 1,6% sekitar 71,6 miliar USD. Krisis kepercayaan yang terjadi dalam sengketa perbatasan mempunyai timbal balik dengan krisis kepercayaan yang terjadi di perdagangan. Kebuntuan yang terjadi dalam proses negosiasi sengketa perbatasan juga berimbas pada perdagangan. Perusahaan telekomunikasi Huawei dan ZTE telah dilarang untuk memasok GSM (sistem global untuk seluler komunikasi) di zona utara dan timur India. Hal ini dipicu kekhawatiran pejabat keamanan nasional India atas penggunaan teknologi tersebut untuk memata-matai atau menyebarkan *malware*. Sebaliknya Tiongkok mengalihkan industri perangkat lunak dari India walaupun kualitas sudah diakui secara global (Huang, 2011, pp. 111-115).

Perdagangan Tiongkok dan India menimbulkan ketidakseimbangan terbukti dengan tren pertumbuhan defisit yang signifikan. India diserbu dengan barang-barang murah Tiongkok yang merusak harga produk lokal. Pelabuhan besar Tiongkok menjadi ancaman jangka panjang bagi bisnis kecil India. Ketidakseimbangan yang sudah kronis ini memaksa India untuk menentukan kebijakan tegas dengan mewajibkan hanya 21% peralatan di impor dari Tiongkok. India kemudian melakukan penyaringan terhadap barang impor dari Tiongkok dan menghasilkan 120 produk Tiongkok di blokir. Selain itu, India juga menolak perjanjian perdagangan bebas yang diusulkan oleh Tiongkok. Para ahli India menganggap bahwa perjanjian ini akan semakin merugikan India karena

mengurangi tarif impor ekspor dan distribusi barang dari Tiongkok semakin masif (Singh B. K., 2011, pp. 177-178).

3.4 Organisational and Procedural Linkage

Struktur yang didalamnya menghubungkan otoritas atau institusi dengan negara atau pemerintahan. *Organisational Linkages* bisa disebut juga sebagai *management system* yang mempunyai metode untuk mengatur suatu isu yang melibatkan anggotanya (Warner, Of River Linkage and Issue Linkage: Transboundary Conflict and Cooperation on the River Meuse. , 2016, p. 5).

3.4.1 Posisi South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) dalam Sengketa Perbatasan India-Tiongkok

SAARC dibentuk pada Desember 1985 dengan anggota Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri lanka dan Afghanistan. Selama dibentuk, organisasi regional ini belum mempunyai ketegasan atau bahkan peran signifikan terhadap anggotanya. Seperti pada November 2016, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAARC ditunda disebabkan ketakutan para anggotanya terhadap isu teror lintas batas. Penundaan KTT SAARC dan memburuknya hubungan India-Pakistan membuat kondisi regional tidak stabil. Ketidakstabilan posisi SAARC sebagai organisasi regional mempermudah intervensi internasional terhadap masalah regional (Bhattacharjee, 2016).

Tiongkok sebagai negara adidaya yang paling dekat dengan Asia Selatan mempunyai pengaruh dan kekuatan untuk masuk dalam ranah SAARC. Pada November 2014, Tiongkok menjadi dewan pengamat dalam KTT ke 18 di Kathmandu.

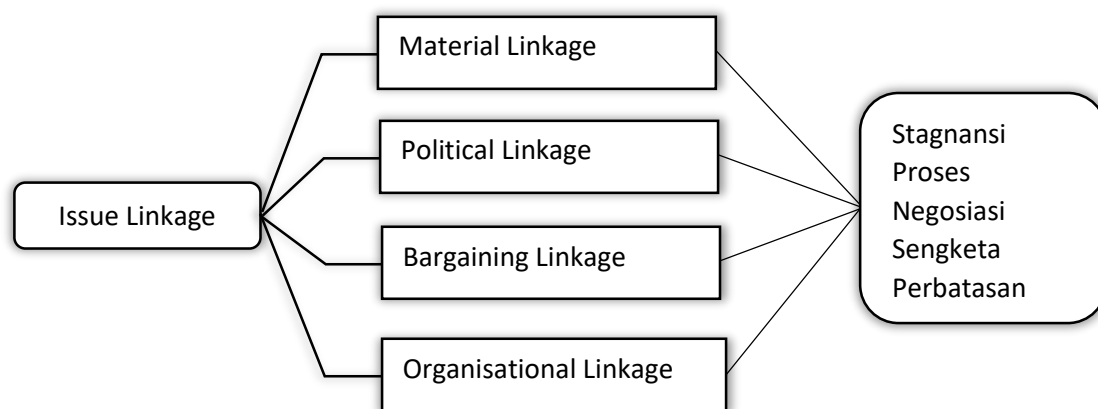
Dalam kesempatan tersebut Tiongkok sudah mulai mengutarakan minatnya untuk masuk sebagai salah satu anggota SAARC. Kemudian India menjadi negara yang paling menentang niat tersebut karena alasan geopolitik. India menganggap bahwa Tiongkok tidak mempunyai hubungan sejarah maupun budaya dengan orang-orang Asia Selatan. Namun Tiongkok mempunyai hubungan geo-ekonomi dalam hal perdagangan dan pembangunan yang erat dengan anggota SAARC seperti Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka. Hal ini berimbas pada dukungan separuh anggota SAARC (Pakistan, Sri Lanka, Nepal dan Maladewa). Ketakutan India lainnya yakni provokasi Tiongkok terhadap anggota SAARC untuk membentuk aliansi anti India atas dominasinya di Asia Selatan selama ini (Ahmar, 2017).

Keberadaan SAARC sebagai organisasi regional di Asia Selatan akan menjadi dilema khususnya dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India. SAARC tidak tegas dengan fungsinya sebagai organisasi regional seperti ketergantungan Pakistan terhadap forum multilateral untuk menyelesaikan sengketa perbatasannya dibanding percaya dengan SAARC. Hal ini disebabkan terjadinya perpecahan antar anggota dengan terbentuknya sub-SAARC seperti sub-SAARC *Motor Vehicle Agreement for the Resolution of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic* dengan anggota Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN). Selain itu juga dibentuk kelompok yang lebih besar yakni *South Asia Sub-Regional Economic Cooperation* (SASEC) dan *Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC) yang bahkan melibatkan Myanmar dan Thailand. Sementara Pakistan semakin aktif membangun konektivitas dengan negara non anggota SAARC seperti

China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) dan kenggotannya dalam *Shanghai Co-Operation Organisation* (SCO). Hal ini menunjukkan tidak adanya tujuan bersama antar anggota SAARC bahkan justru menciptakan persaingan didalamnya. Selain itu hegemoni India dalam ekonomi dan politik di SAARC telah menyebarkan sentimen anti-India dan semakin membuka kesempatan Tiongkok untuk masuk sebagai pihak yang dapat menralisir hegemoni tersebut (Kumar V. , 2016).

SAARC tidak mempunyai peran signifikan dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India karena kedua negara lebih mengutamakan penyelesaian secara bilateral. Lebih lagi organisasi regional yang sudah terbentuk sejak tahun 1985 ini belum mampu untuk mengatur pertemuan sejak 1988. Tiga belas dari tiga puluh satu pertemuan KTT yang telah dilakukan tidak berjalan sesuai jadwal. Hingga KTT terakhir pada tahun 2014 di Kathmandu tidak dilakukan pembahasan mengenai sengketa perbatasan Tiongkok-India meskipun Tiongkok hadir dalam KTT tersebut sebagai dewan pengamat. Hal ini membuktikan keberadaan SAARC belum mempunyai kapasitas sebagai organisasi regional baik bagi permasalahan intra regionalnya maupun luar regional (White, 2015, p. 7).

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel *organizational linkage* termasuk dalam aspek *non linkage* karena tidak mempunyai hubungan aktif dengan isu utama. SAARC tidak mempunyai posisi tawar yang signifikan karena eksistensinya yang belum memadai sebagai organisasi regional. Selain itu SAARC belum mempunyai peran dalam sengketa perbatasan Tiongkok-India bahkan dalam KTT SAARC.



Penulis menggunakan teori *issue linkage* sebagai alat untuk menganalisa isu sengketa perbatasan antara Tiongkok dan India. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kebuntuan proses negosiasi yang berakibat pada terhambatnya resolusi konflik. Terdapat empat variabel yang digunakan yakni *Material Linkage*, *Political Linkage*, *Bargaining Linkage* dan *Organisational Linkage*. Melihat hasil dari penelitian menggunakan variabel diatas bahwa penyelesaian suatu konflik ataupun sengketa perbatasan tidak hanya berpatok pada proses negosiasinya namun juga keterlibatan isu lain. Namun juga perlu diketahui terlebih dahulu hal mendasar yang menyebabkan proses negosiasi tidak berjalan optimal dan perjanjian yang telah dilakukan kurang efektif. Variabel *material linkage* berperan sebagai alat analisis untuk mengetahui hal tersebut dengan melihat implementasi CBMs dan pengaruh *state prestige*. Setelah itu menelaah faktor lain yang mempengaruhi ketidakstabilan proses negosiasi. Variabel *political linkage* digunakan untuk menganalisis pengaruh negara yang mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak yakni Pakistan dan Tibet. Negara yang mempunyai kedekatan secara geografis, politik ataupun budaya. Variabel *bargaining linkage* digunakan untuk mengetahui hal yang

sering digunakan kedua belah pihak untuk melakukan tawar menawar kebijakan yakni ekonomi dan perdagangan. Interdependensi ekonomi ternyata menimbulkan efek menjatuhkan salah satu pihak dan menguntungkan bagi yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih. Terakhir *organizational linkage* menjadi variabel untuk mengetahui peran organisasi regional dalam kasus tersebut. Namun ternyata SAARC selaku organisasi regional di Asia Selatan belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan isu tersebut.

